

Judul : Atasi rentang kendali & perkuat pengawasan, Polri diusulkan dibagi dua wilayah
Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Atasi Rentang Kendali & Perkuat Pengawasan Polri Diusulkan Dibagi Dua Wilayah

Pakar Kriminologi Universitas Indonesia (UI) Adrianus Eliasta Sembiring Meliala mengusulkan, Polri dibagi berdasarkan wilayah teritorial. Hal ini dilakukan guna memperpendek rentang kendali organisasi dan memperkuat pengawasan internal. Usulan ini pun menjadi perbincangan Anggota Komisi III DPR selaku mitra Kepolisian dan menjadi perhatian pengamat Kepolisian. Usulan tersebut disampaikan Adrianus saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurut Adrianus, persoalan bu-

daya organisasi di tubuh Polri, erat kaitannya dengan lemahnya pengawasan akibat luasnya wilayah kerja dan panjangnya struktur komando. "Kalau dalam hal ini soal budaya itu soal pengawasan, maka bagaimana kalau kita belah dua kepolisian ini, ada Polri wilayah timur dan Polri wilayah barat," ujar Adrianus. Dia menilai, pembagian tersebut akan memudahkan pimpinan tertinggi untuk lebih sering berada di lapangan sekaligus memfokuskan pengawasan terhadap potensi penyimpangan. Adrianus menambahkan, berbagai macam penyimpangan itu lalu kemudian dapat lebih mudah

difokuskan. "Pimpinan tertinggi lebih mudah untuk berada di lapangan, sekaligus juga untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi," katanya. Adrianus mencontohkan, pembagian itu dapat diikuti dengan penunjukan wakil kepala kepolisian untuk masing-masing wilayah. "Saya mengusulkan misalnya Polri wilayah timur ada waka Polri A, Polri wilayah barat ada waka Polri B," ujarnya. Dia menegaskan, secara struktur dan fungsi keduanya tetap sama, hanya wilayah pengendaliannya yang dibagi. Dengan begitu, lanjut dia, kontrol organisasi menjadi lebih

pendek dan efektif. "Kalau Kapolri cuma satu, waka Polrinya cuma satu, dengan adanya dua waka Polri ini, maka kemudian makin mudah terlihat dan sekaligus dengan cepat tertanggulangi," jelas dia. Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai usulan pembentukan Polri bagian barat dan timur bagus. Meskipun, dia lebih memilih penguatan pada setiap Polda saja. "Ide itu bagus juga untuk mengatasi rentang kendali," ungkap Nasir Djamil kepada *Rakyat Merdeka* melalui sambungan telepon, Rabu (21/1/2026).

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso berpandangan, dalam melakukan reformasi Polri bukan dengan membelah struktur kepolisian secara geografis. Menurut dia, persoalan mendasar Polri terletak pada reformasi kultural dan struktural. "Kalau hanya terkait rentang kendali, tugas itu dalam tupoksinya sudah ada Kapolda di masing-masing provinsi," ujar Sugeng kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (21/1/2026). Untuk mengetahui pandangan Nasir Djamil dan Sugeng Teguh Santoso mengenai usulan dibentuknya Polri bagian barat dan timur, berikut wawancaranya.

NASIR DJAMIL, Anggota Komisi III DPR

Bagus Untuk Atasi Rentang Kendali



“Kalau integritas dan moralitas yang menuntun dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, tentu Polri adalah bagian dari mereka.”

Bagaimana Anda melihat usulan dibentuknya Polri menjadi dua wilayah, yakni barat dan timur?
Ya bagus juga. Dulu kan ada Kepala Polisi Wilayah (Kapolwil) yang membawahi polres-polres, namun kemudian itu dihapus. Sebenarnya kan organisasi itu kan manajemen dan menghidangkan struktur itu dalam rangka merealisasikan cita-cita, tujuan, program dan sebagainya. Jadi aku pikir bagus, juga ide tersebut supaya mengatasi rentang kendali. Tapi memang Kepolisian harus kembali ke struktur awal.

Struktur awal itu bagaimana?
Ya males Polri kecil, polda cukup polres besar dan polsek kuat. Itu sebenarnya. Jadi dulu punya semangat yang seperti itu. Kalau itu bisa direalisasikan, mungkin usulan menghidangkan dua waka Polri tidak dibutuhkan. Namun, ini kembali kepada integritas dan moralitas. Karena dua hal itu yang memandu kerja-kerja anggota

Keolisian. Hubungan antara atasan dan bawahan sebaiknya hubungan profesionalisme sehingga terbangun kerja-kerja yang profesional, objektif, terbuka dan bertanggung jawab secara moral maupun hukum.

Jadi menurut Anda integritas dan moralitas yang menentukan kinerja institusi ini ya?
Kalau integritas dan moralitas yang menuntun dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, tentu masyarakat melihat Polri adalah bagian dari mereka. Jadi Polri untuk masyarakat itu harus dibuktikan dengan kerja nyata. Jika cita-cita awal bisa konsisten, maka yang perlu diperkuat di wilayah. Bisa jadi waka polidanya yang dua atau dibutuhkan kembali kapolwil kalau dibutuhkan. Sebab, kita ini kan birokrasi Indonesia.

Maksudnya bagaimana?
Taktiknya justru ada kubu-kubu

lagi. Misl, ini kubu waka polri ini, tubuh waka polri itu. Jadi menurut saya birokrasi Indonesia belum kondusif untuk hal seperti itu.

Anda melihat rentang kendali yang terjadi pada tubuh Polri saat ini?
Kalau dilihat tupoksi masing-masing ada itu. Mereka kan juga ada fungsi pembinaan. Di daerah ada Inspektur Pengawasan Daerah (Irwada). Itu kan lebih kepada pembinaan ke internal namun bukan hanya pembinaan administrasi saja. Tetapi, bagaimana manajemen bisa berjalan dengan baik. Kemudian waka polida itu kan sebenarnya lebih ke dalam institusi Polda. Jadi Waka polida jangan sampai hanya menjadi pajangan saja. Sehingga peran waka polida harus bisa membantu Kapolda dalam pembinaan manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, memastikan penegakan hukum *fair*, objektif, terbuka. ■ **NM**

SUGENG TEGUH SANTOSO, Ketua Indonesia Police Watch

Polri Itu Bersifat Satu & Nasional



“Pengawasan dan sanksi memang perlu direformasi, tetapi bukan dengan menambah posisi Waka Polri jadi dua.”

Bagaimana Anda melihat usulan agar dibentuk Polri dua wilayah, yakni barat dan timur?
Usulan tersebut terkesan baik ya, yaitu pendelegasian tugas dan kewenangan pengawasan organisasi pada dua Waka Polri. Tetapi kalau hanya terkait rentang kendali, tugas itu dalam tupoksinya sudah ada Kapolda di masing-masing provinsi yang akan menjadi pimpinan pengendali di wilayah masing-masing. Selain itu, Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah Polri yang bersifat nasional dan satu. Strukturnya komando dari pusat (Mabes) sampai Polsek-Polsek adalah satu. Satu kepimpinan Polri nasional tidak bisa dibagi atau dibelah.

Salah satu alasannya untuk memperlambat pengawasan, Anda setuju?
Pengawasan dan sanksi memang perlu direformasi, tetapi bukan dengan menambah posisi Waka Polri jadi dua. Pengawasan dan sanksi lebih dikaitkan dengan reformasi kultural, yaitu peningkatan profesionalisme dan akan-

tabilitas pejabat pengawasan internal atau praktik *silent blue code* sangkat kentara, serta reformasi struktural.

Reformasi struktural apa yang Anda maksud?
Di antaranya Pengawasan Penyidikan Polri (Wassidik) ditarik di bawah langsung Kapolri dari sebelumnya di bawah Kabareskrim, serta masuknya *ad hoc* di Komite Kode Etik Kepolisian yang memeriksa dan mengadili pelanggaran. Merujuk pada isu *silent blue code* di mana beberapa fenomena oknum perwira polisi yang diberikan sanksi pemberhentian tetap atau demosi yang ternyata menyalahgunakan kewenangan, bahkan kemudian naik pangkat, menjadi satu titik perhatian masyarakat. Kami dari IPW menyambut proses ini sebagai imunitas meraguk.

Apa penyebabnya?
Karena saat mereka oknum perwira polisi, ditukum oleh Komisi Kode Etik Tingkat Pertama dengan berat karena

menjadi perhatian publik. Tetapi dengan lewatnya waktu yang cukup lama, ketika diduga masyarakat mulai tidak memperhatikan tentunya putusan-putusan Komisi Kode Etik Kepolisian, masyarakat dikejutkan belakangan bahwa oknum perwira tersebut naik pangkat dan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Oleh karena itu, kami berpendapat terhadap pengawasan internal dan eksternal.

Pengawasan seperti apa yang Anda ingin kan?
Pertama, pada Komisi Kode Etik Kepolisian dibentuk *ad hoc* yang diisi oleh unsur masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerhati kepolisian. Komisi ini bertujuan untuk melakukan pengawasan independen terhadap perilaku anggota Polri, termasuk penegakan disiplin dan penerapan kode etik. Kedua, struktur Wassidik diubah menjadi berada di bawah pimpinan, yaitu di Mabes Polri. Dengan demikian, Wassidik tidak lagi berada di bawah Reserse. ■ **NM**